

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		46.982.737.674,00	48.326.458.632,00
Penerimaan Retribusi Daerah		4.450.367.583,00	4.073.009.708,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.967.609.930,00	14.112.352.048,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		143.766.690.430,74	126.317.904.132,77
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		84.294.507.000,00	83.168.162.473,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		239.685.693.000,00	214.404.530.490,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		919.817.829.148,00	925.026.162.597,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		310.083.135.457,00	320.731.403.822,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		104.063.293.300,00	151.951.510.090,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		6.506.703.000,00	15.587.916.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.056.856.908.022,74</b>	<b>2.095.784.613.992,77</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		854.797.200.588,72	785.061.183.209,31
Pembayaran Barang		676.548.786.597,38	736.412.520.191,32
Pembayaran Subsidi		259.876.000,00	0,00
Pembayaran Hibah		110.962.245.385,99	71.486.038.456,29
Pembayaran Bantuan Sosial		299.000.000,00	500.126.230,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		305.854.767.508,00	307.190.473.500,00
Pembayaran Tak Terduga		1.157.985.156,00	183.454.962,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	4.747.545.725,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	499.327.250,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.949.879.861.236,09</b>	<b>1.906.080.669.523,92</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>106.977.046.786,65</b>	<b>189.703.944.468,85</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	5.5.2		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.2.1		
Penjualan Aset Tetap		465.216.000,00	1.296.800.500,00
<b>Jumlah Arus masuk Kas</b>		<b>465.216.000,00</b>	<b>1.296.800.500,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.2.2		
Perolehan Peralatan dan Mesin		53.172.618.238,21	59.841.785.825,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		52.866.220.044,23	57.555.551.158,70
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		125.646.558.484,99	76.405.708.976,58
Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.167.368.150,00	5.281.348.935,00
Perolehan Aset lainnya		34.620.900,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>236.887.385.817,43</b>	<b>199.084.394.895,28</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(236.422.169.817,43)</b>	<b>(197.787.594.395,28)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	5.5.3		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		129.132.972,00	254.111.994,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>129.132.972,00</b>	<b>254.111.994,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>129.132.972,00</b>	<b>254.111.994,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)		106.737.775.166,43	107.355.060.268,25
Penerimaan Sisa UP		2.102.302,88	393.270.662,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>106.739.877.469,31</b>	<b>107.748.330.930,25</b>

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		106.747.160.495,83	107.419.609.044,25
Sisa Tahun 2023 yang Sudah Dibayarkan		133.501,00	2.102.302,88
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>106.747.293.996,83</b>	<b>107.421.711.347,13</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(7.416.527,52)</b>	<b>326.619.583,12</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	5.5.5	<b>(129.323.406.586,30)</b>	<b>(7.502.918.349,31)</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di FKTP &amp; Kas Dana BOS</b>	5.5.6	<b>162.304.262.284,56</b>	<b>169.807.180.633,87</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di FKTP &amp; Kas Dana BOS</b>	5.5.7	<b>32.980.855.698,26</b>	<b>162.304.262.284,56</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	5.5.8	<b>11.825.864,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	5.5.9	<b>133.501,00</b>	<b>2.102.302,88</b>
<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	5.5.10	<b>0,00</b>	<b>767.500,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	5.5.11	<b>32.992.815.063,26</b>	<b>162.307.132.087,44</b>



BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

---

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek diantaranya berupa Utang Belanja sebesar Rp88.036.612.607,09 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 26 Mei 2025  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Riau

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

